

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Gelanggang Olahraga H. Agus Salim dalam lingkup pemanfaatan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. GOR H. Agus Salim sudah dikelola oleh Pemerintah kota Padang selama ± 31 tahun dan pada tahun 2015 dipinjam pakai lagi kepada Pemerintah Kota Padang melalui surat perjanjian pinjam pakai barang milik daerah Nomor: 166/Perj./BPAD-XII/2014, untuk sarana dan prasarana olahraga yang ada di GOR dimanfaatkan selain untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam urusan kepemudaan dan olahraga melalui pembinaan atlet-atlet juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin berolahraga dan berekreasi, baik rekreasi keluarga maupun wisata kuliner, karena di GOR tidak hanya ada sarana olahraga namun juga ada kios-kios makanan, dan pemanfaatan atas barang milik daerah tersebut tentunya dikenakan retribusi sesuai Perda Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Kemudian Bentuk pemanfaatan GOR sendiri oleh Pemerintah yaitu melalui kerja sama pemanfaatan Stadion H. Agus Salim dengan PT. Kabau Sirah yang merupakan pemilik dari Tim Sepak Bola Semen Padang FC. Kemudian juga dapat disimpulkan bahwa sebagai sarana dan prasarana olahraga yang representatif di Kota Padang, GOR H. Agus Salim mengalami disfungsi pengelolaan yang mana, banyak dari sarana dan prasarana olahraga tersebut yang dimanfaatkan sebagai tempat berjualan dan bahkan tempat tinggal hal ini tentu

tidak sesuai dengan Pasal 67 ayat (7) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

2. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang yang dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu berkenaan dengan alihfungsi sarana dan prasarana olahraga menjadi tempat tinggal dan tempat berjualan dan kepemilikan GOR H. Agus Salim yang masih merupakan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga pengembangan sarana dan prasarana olahraga jadi tidak maksimal dikarenakan juga terbatasnya anggaran, dan anggaran yang diajukan ke DPRD pun cenderung tidak diterima. Kemudian pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang meresahkan pengunjung GOR H. Agus Salim yang sampai sekarang belum ditemukan solusinya.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam hal ini permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis memberikan saran-saran dalam rangka pengelolaan GOR H. Agus Salim sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah yang optimal Pemerintah Kota Padang harus konsisten dalam melakukan pemanfaatan GOR sebagai kawasan olahraga, sehingga tidak akan ada pengalihfungsian sarana dan prasarana yang ada, dan dasar hukum pengelolaan sarana dan prasarana olahraga harus diperkuat dengan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sarana dan prasarana olahraga. Kemudian aset GOR sejatinya memang sudah harus merupakan aset milik Pemerintah Kota Padang, mengingat Pemerintah Kota Padang sudah mengelola GOR dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian dalam hal pemanfaatan harus mengacu kepada

peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah, bisa dengan menggandeng pihak swasta yang bergerak di bidang sarana dan prasarana olahraga serta peran serta masyarakat dibutuhkan juga dalam pengelolaan GOR H. Agus Salim.

2. Agar Pemerintah Kota Padang lebih tegas kepada masyarakat yang menggunakan bangunan di GOR tidak sesuai peruntukkan dan melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar terutama para pemuda agar saling menjaga keamanan GOR H. Agus Salim sehingga masyarakat yang berkunjung bisa nyaman dan akan lebih banyak datang ke GOR H. Agus Salim yang ujungnya bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

